



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Nomor : 660/0470/DLHP/B.I/2019  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Peihal : Persetujuan Validasi KLHS  
RPJMD Kota Palembang  
Tahun 2018-2023

Palembang, 26 Februari 2019  
Kepada  
Yth. Walikota Palembang  
di -  
Palembang

Sehubungan dengan surat Walikota Palembang tanggal 31 Januari 2019 Nomor 922/000344/BPP-LITBANG/2019 perihal Permohonan Jadwal Validasi KLHS RPJMD Kota Palembang Tahun 2018-2023 dan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016, bersama ini disampaikan sebagai berikut :

1. Hasil kajian tim validasi KLHS Provinsi Sumatera Selatan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Palembang dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - a. KLHS RPJMD Kota Palembang disusun oleh Tim Pembuat Dokumen KLHS RPJMD Kota Palembang yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Palembang Nomor 440.b/KPTS/BAPPEDA-LITBANG/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusun KLHS RPJMD Kota Palembang 2018-2023 dan dibantu oleh tenaga ahli yang telah mempunyai kompetensi dalam menyusun KLHS.
  - b. Pemerintah Kota Palembang telah melaksanakan dan memberikan penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kota Palembang Tahun 2018-2023 melalui Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas Nomor 31/BA/BAPPEDA LITBANG/2018 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kota Palembang dan Kepala Bappeda Litbang Kota Palembang.
  - c. KLHS RPJMD Kota Palembang disusun Pemerintah Kota Palembang dengan rangkuman muatan sebagai berikut :
    - 1) berdasarkan identifikasi indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dari 181 (seratus delapan puluh satu) indikator yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palembang, baru 62 (enam puluh dua) indikator yang mencapai target nasional sedangkan 28 (dua puluh delapan) indikator belum mencapai target nasional dan 91 (sembilan puluh satu) indikator tidak ada data;

- 2) isu strategis prioritas yang dirumuskan adalah menurunkan angka kemiskinan di Kota Palembang;
  - 3) terdapat 3 (tiga) skenario pembangunan dalam upaya pencapaian target pembangunan yaitu skenario kondisi lingkungan hidup, skenario capaian tujuan pembangunan belanja dan skenario pendapatan dan belanja daerah berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi;
  - 4) rekomendasi dari isu strategis masih secara global dan bersifat umum dan belum dituangkan dalam program-program perangkat daerah.
- d. Proses penjaminan kualitas KLHS RPJMD telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palembang melalui Tim Penyusun KLHS RPJMD Kota Palembang yang memenuhi syarat kompetensi penyusunan KLHS sebagaimana diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016.
- e. Keseluruhan proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD yang diajukan Pemerintah Kota Palembang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 dan telah sesuai dengan tahapan pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016, dengan catatan muatan yang terdapat dalam KLHS RPJMD Kota Palembang Tahun 2018-2023 akan diintegrasikan ke dalam RPJMD Kota Palembang Tahun 2018-2023.
2. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan sesuai hasil kajian oleh tim validasi KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Selatan bahwa Dokumen KLHS RPJMD Kota Palembang dinyatakan telah memenuhi kriteria untuk disetujui hasil validasinya.

Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta